

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET DESA DALAM MENUNJANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA KEBUMEN
KECAMATAN BATURRADEN**

**Oleh:
ADITYA RIZA DHARMAWAN
E1A115011**

ABSTRAK

Otonomi desa terkandung dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dan aset desa secara umum. Permasalahan skripsi ini tentang kebijakan pengelolaan aset desa dan apakah kebijakan pengelolaan aset dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kebumen Kecamatan Baturraden. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan situs-situs internet.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan kebijakan pengelolaan aset desa di Desa Kebumen terdapat didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dibuat berdasarkan Visi dan Misi dari Kepala Desa dan diimplementasikan dalam strategi pembangunan desa. Strategi pembangunan desa yang terkait dengan aset desa adalah menggali potensi sumber daya alam dan kemakmuran rakyat yang dilakukan dengan cara peningkatan dan pengoptimalan sawah kas desa secara maksimal. Pengelolaan aset secara maksimal dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil aset masuk dalam Pendapatan Asli Desa (PADes) yang penggunaannya menjadi kewenangan desa secara penuh. Ketika penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan kebutuhan semua bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan terpenuhi, desa akan lebih maju menjadi desa yang mandiri serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.

Kata kunci: Kebijakan, Pengelolaan, Aset Desa.

***VILLAGE ASSET MANAGEMENT POLICY IN SUPPORTING THE
EXECUTION OF VILLAGE GOVERNANCE IN KEBUMEN VILLAGE,
BATURRADEN DISTRICT***

By:
ADITYA RIZA DHARMAWAN
E1A115011

ABSTRACT

Village autonomy is contained in Law Number 6 of 2014 about Villages that regulates village administration and village assets in general. This essay discusses village asset management policy in supporting the execution of village governance in Kebumen Village, Baturraden District. The purpose of this research is to analyze the village asset management policies, to find out and analyze whether the management of village assets could support the implementation of village governance in the Kebumen Village, Baturraden District. The type of this research is normative juridical research with statute and analytic approach methods. The data used are secondary data in the form of laws, literatures, and internet sites.

Based on the results and discussion of this research, it could be concluded that village assets management policies in Kebumen Village are included in the Village Medium Term Development Plan (RPJMDes) that made based on the Vision and Mission of the Village Head and implemented in the village development strategy. The village development strategy related to village assets using the potential of natural resources and people's prosperity is carried out by maximizing and optimizing village cash fields to the maximum. Maximum asset management can support the implementation of village governance. Organizing village government, organizing village governance, organizing village governance, community development and community empowerment. The Village Original Revenue (PADes) which its use is fully the authority of the village. When the administration of village government can run well and the needs of all fields in the administration of the government are fulfilled, the village will be more advanced to become an independent village and can improve the welfare and prosperity of its people.

Keywords: *Policy, Management, Village Asset.*